

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi. 2022. Tersedia: <http://jabar.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- CNN Indonesia. 2019. *Periode II, Jokowi Diminta Tingkatkan Alokasi Dana ke Jabar*. Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191020140320-532-441138/periode-ii-jokowi-diminta-tingkatkan-alokasi-dana-ke-jabar> diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Detik News. 2019. *Ironi Kabupaten Bogor: PAD Tertinggi di Jabar, Banyak Desa Tertinggal*. Tersedia: <https://news.detik.com/berita/d-4738366/ironi-kabupaten-bogor-pad-tertinggi-di-jabar-banyak-desa-tertinggal/1> diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Okezone. 2019. *Soal DAU, Ridwan Kamil Ingin Adanya Keadilan Fiskal*. Tersedia: <https://economy.okezone.com/read/2019/09/09/20/2102474/soal-dau-ridwan-kamil-ingin-adanya-keadilan-fiskal> diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Okezone. 2019. *Selisih Anggaran Daerah Rp. 20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan*. Tersedia: <https://economy.okezone.com/read/2019/06/20/20/2068682/selisih-anggaran-daerah-rp20-triliun-pemda-diminta-genjot-penyerapan> diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sekaran, Uma., dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis, Ed. VI, Tim Editor*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyanta. 2016. *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 14(1):19-40
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis, Ed. III*. Bandung: Alfabeta.
- Tagar News. 2018. *Pajak dan Retribusi BUMD Belum Dongkrak PAD Jabar*. Tersedia: <https://www.tagar.id/pajak-dan-retribusi-bumd-belum-dongkak-pad-jabar> diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Tribun Jabar. 2018. *Pemprov Jabar Kebut Serapan Anggaran Sampai Akhir Tahun*. Tersedia: <https://jabar.tribunnews.com/2018/12/25/pemprov-jabar-kebut-serapan-anggaran-sampai-akhir-tahun> diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Utang Rosidin. 2015. *Teori, Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.